

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



PANDUAN DAN PETUNJUK TEKNIS
**KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
REVOLUSI MENTAL TAHUN 2018**
KKN - RM 2018



TIM PENYUSUN

PENYUSUN

- Asril (Kemenko PMK)
- Ahlan (Kemenko PMK)
- Didin Wahidin (Kemenristek Dikti)
- Linda Restaningrum (Kemenko PMK)
- Nuswardang. S (Kemenko PMK)
- Ayu Dewita (Kemenko PMK)
- Arif Maelan (Kemenko PMK)
- Arya Setia Ningrum (Kemenko PMK)

SETTING COVER LAYOUT ISI

- Asril
- Anang
- Mareta
- Dimsur

Edisi Ke-1 : 2018

PENERBIT

Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Republik Indonesia
2018



KATA SAMBUTAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya buku yang berjudul “Panduan dan Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental (KKN - RM) Tahun 2018”. Buku ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program KKN-RM Tahun 2018.

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu 3 (tiga) nilai strategis instrumental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM menjadi agenda utama kita dalam pembangunan manusia Indonesia sebagaimana telah dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM. GNRM terdiri atas 5 (lima) gerakan yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Dalam implementasinya, GNRM tidak dilakukan secara vertikal (inisiatif pemerintah) semata, namun melalui pendekatan horizontal dalam bingkai gotong royong yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk didalamnya partisipasi dunia pendidikan.

Pemerintah dan Perguruan Tinggi (PT) telah berkoordinasi dan bersinergi untuk menyukseskan program Revolusi Mental dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas, beretos kerja positif, dan bergotong-royong. Fakta membuktikan bahwa perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa tidak bisa terlepas dari kontribusi para pemuda terutama mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan di Perguruan Tinggi yang telah bersinergi dengan GNRM. Kegiatan KKN dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir secara interdisipliner dan kemitraan sebagai salah satu muatan akademik yang harus dijalani oleh mahasiswa.

Terkait peran serta mahasiswa untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat sekaligus mengimplementasikan GNRM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sejumlah Perguruan Tinggi melakukan kerjasama untuk melaksanakan penguatan program KKN dengan muatan Revolusi Mental. Saya berharap Perguruan Tinggi menjadi garda terdepan dalam implementasi GNRM. Perguruan Tinggi harus dapat berperan sebagai agen perubahan, menjadi pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Program KKN-RM Tahun 2018 akan diikuti oleh lebih dari 30 PT di seluruh Indonesia. Selama melaksanakan KKN-RM bersama masyarakat dan aparatur, mahasiswa akan melaksanakan internalisasi gerakan atau akasi dalam GNRM, yang mencakup melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Melalui kegiatan KKN-RM diharapkan akan terbangun masyarakat berkarakter lebih baik, maju, mandiri, bermartabat, dan berjati diri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang bekerja keras menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat membantu dalam kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan KKN-RM serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 27 Maret 2017
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ir. Y. B. Satya Sananugraha, M.Eng
NIP. 1963123019871110

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga buku yang berjudul “Panduan dan Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental (KKN-RM) Tahun 2018” dapat diselesaikan.

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah dimuat dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla. GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu 3 (tiga) nilai strategis instrumental yaitu nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Presiden telah menerbitkan Instruksi (Inpres) Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM. GNRM terdiri atas 5 (lima) gerakan yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Sebagai sebuah gerakan, GNRM dilakukan secara bersama oleh seluruh komponen melalui pendekatan horizontal dalam bingkai gotong royong, termasuk dengan melibatkan dunia pendidikan. Perguruan Tinggi (PT) telah lama dikenal sebagai Agent of Change. Sejak tahun 2016, Pemerintah dan Perguruan Tinggi telah berkoordinasi dan bersinergi melalui kegiatan KKN untuk menyukseskan program Revolusi Mental dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas, beretos kerja positif, dan bergotong-royong. KKN merupakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami dan mencari solusi atas berbagai permasalahan nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan KKN-RM diharapkan akan terbangun masyarakat berkarakter lebih baik, maju, mandiri, bermartabat, dan berjati diri.

Undang-Undang mengamanatkan PT untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan masyarakat. Dalam prakteknya, Perguruan Tinggi harus dapat berperan sebagai agen perubahan pikiran, sikap, dan perilaku yang berbasis lptek

di tengah masyarakat sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Proses pembelajaran di Perguruan Tinggi menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter dan kompetensi yang merupakan “never ending process” sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Perguruan Tinggi juga dikatakan sebagai lembaga penghasil calon pemimpin bangsa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan KKN-RM untuk mengimplementasikan GNRM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sejumlah Perguruan Tinggi melakukan penguatan program KKN mahasiswa dengan muatan Revolusi Mental. Program KKN-RM Tahun 2018 akan diikuti oleh lebih dari lima belas ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Selama melaksanakan KKN-RM bersama masyarakat dan aparat, mahasiswa akan melaksanakan internalisasi salah satu nilai strategis revolusi mental, yaitu INTEGRITAS. Nilai integritas tersebut akan diwujudkan melalui Gerakan Indonesia Melayani. Karena itu, perlu disusun sebuah buku panduan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan KKN-RM di 2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Masukan dan usulan sangat kami harapkan demi perbaikan isi buku ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
Bab I Pendahuluan	8
1. Latar Belakang	10
2. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan KKN – RM	14
2.1 Prinsip Dasar	14
2.2 Pembiayaan dan Pelaksanaan	16
3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat	16
3.1 Tujuan Umum	16
3.2 Tujuan Khusus	17
3.3 Sasaran	18
3.4 Manfaat	18
1. Mahasiswa	18
2. Masyarakat, Minat, dan Pemerintah Daerah	18
3. Perguruan Tinggi	19
Bab II Pengelolaan KKN - RM	20
1. Prosedur KKN -RM	22
2. Lembaga Pengelolaan	23
3. Tata Laksana Pengelolaan	25
4. Persyaratan	26
Bab III Tahapan Kegiatan KKN - RM	28
1. Persiapan	30
2. Pelaksanaan	31

Bab IV Evaluasi Program KKN - RM	34
Bab V Petunjuk Substansi KKN - RM	38
1. Substansi gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	40
1.1 Gerakan Indonesia Melayani	40
1.2 Gerakan Indonesia Bersih	41
1.3 Gerakan Indonesia Tertib	45
1.4 Gerakan Indonesia Mandiri	48
1.5 Gerakan Indonesia Bersatu	51
2. Prosedur Program KKN-RM di Perguruan Tinggi	52
3. Pelaksanaan KKN - RM	53
4. Monitoring dan Evaluasi	54
5. Koordinasi Pembimbingan dan Komunikasi	55
6. Tata Tertib Mahasiswa Dalam KKN - RM	57
LAMPIRAN	61





BAB I PENDAHULUAN

KKT
UNSRIT
GRATED FIELD STUDY

1. LATAR BELAKANG

Revolusi mental merupakan semangat untuk melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia, sehingga memerlukan gerakan hidup baru untuk mewujudkan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berkari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Semangat perubahan berkemajuan melalui Revolusi Mental dibangkitkan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Komitmen tersebut menjadi kehendak politik Kabinet Kerja yang menekankan Revolusi Mental dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk lebih mempertegas, kemudian diterbitkan Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Pentingnya Revolusi Mental, tercermin dari Penyelenggara Negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental atau karakter bangsa Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan sehingga untuk memperbaiki cara pandang dan merubahnya memerlukan gerakan bersama dengan melibatkan semua komponen bangsa secara bergotong-royong.

Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi Mental merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran nyata Penyelenggara Negara dan seluruh elemen masyarakat secara nasional. Unsur pelaksana gerakan ini setidaknya terdiri atas 4 (empat) pelaku utama yaitu Penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) baik di pusat maupun di daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. GNRM memerlukan inisiatif semua unsur Penyelenggara Negara dan masyarakat untuk bersama-sama secara bergotong-royong mengubah keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat.

Implementasi GNRM dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai instrumental pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat luas dan lembaga negara. Keberhasilan Revolusi Mental menyaratkan manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki karakter, integritas, keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kerja serta komitmen yang tinggi untuk bekerja dan bersinergi secara bergotong-royong.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT), pada Bagian Kesebelas Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pada Pasal 48 ayat 1, disebutkan bahwa “PT berperan aktif menggalang kerjasama antar PT dan antara PT dengan dunia usaha, dunia industri dan Masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Adapun terkait dengan ruang lingkup, kedalaman dan kombinasi pelaksanaan Tridharma PT dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan Program PT.

Penelitian yang dilakukan oleh PT harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional dan perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu program yang dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.



Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa berkesempatan mempelajari persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Pada waktu yang sama, mahasiswa yang didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan, pun berkesempatan untuk membagi lptek kepada masyarakat.

Seiring dengan berjalannya peradaban, telah terjadi Revolusi Industri sejak awal abad 19. Saat ini kita berada di era Revolusi Industri ke-4. Perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti transportasi, informasi, dan komunikasi menjadikan dunia ini tanpa batas, sampai daerah terpencil bahkan masuk ke dalam tatanan kebudayaan, dan agama. Adanya media elektronik seperti televisi, internet, handphone, media atau koran elektronik menembus sekat-sekat tradisional yang selama ini dipegang sekuat-kuatnya. Moralitas menjadi melonggar, sesuatu yang dulu dianggap tabu, sekarang menjadi biasa-biasa saja. Cara berpakaian, berinteraksi dengan lawan jenis, menikmati hiburan di tempat-tempat spesial dan menikmati narkoba menjadi trend dunia modern yang sulit ditanggulangi.

Akhirnya, karakter bangsa berubah menjadi rapuh, moral bangsa terjerumus dalam trend budaya yang melenakan, dan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip moral, budaya bangsa, dan perjuangan hilang dari karakteristik mereka. Inilah yang menyebabkan dekadensi moral serta hilangnya kreativitas dan produktivitas bangsa. Sebab, ketika karakter suatu bangsa rapuh maka semangat berkreasi dan berinovasi dalam kompetensi yang ketat akan mengendur, dan mudah dikalahkan oleh semangat konsumerisme, hedonisme, dan pesimistisme yang instan dan menenggelamkan.

Upaya pemerintah menjadi sangat relevan untuk mengedepankan pembangunan karakter bangsa melalui Revolusi Mental sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta sejumlah PT melakukan penguatan nilai revolusi mental dalam Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).



KKN-RM adalah program KKN mahasiswa dengan fokus spesifik berbasis pada internalisasi nilai-nilai strategis RM, *yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong*. Implementasi 3 nilai strategis tersebut diwujudkan melalui sikap/perilaku melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu kepada masyarakat di kota maupun di desa agar terbangun karakter mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. KKN-RM merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan. Untuk tahun 2018, KKN-RM difokuskan pada penanaman nilai INTEGRITAS melalui peran aktif mahasiswa dan masyarakat luas untuk mewujudkan pelayanan publik dan perilaku aparat yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi.

2. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN KKN-RM

2.1 Prinsip Dasar

Seperti pola KKN, KKN Tematik RM dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip KKN, yaitu:

- a. Keterpaduan aspek Tridharma Perguruan Tinggi : aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integritas, etos kerja dan gotong royong menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN-RM.
- b. Pencapaian Tiga Manfaat KKN-RM dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan institusi (institutional development) yang berlandaskan pada integritas, etos kerja yang tinggi serta mempunyai sifat-sifat gotong-royong.

- c. Empati Partisipatif: KKN-RM dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan. KKN-RM dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah dan swasta. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN-RM harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.\
- d. Aspek Interdisipliner: KKN-RM dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keagamaan. Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir, sikap dan perilaku dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN-RM.
- e. Komperehensif-Komplementatif dan berdimensi luas: KKN- RM berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.
- f. Realistis-Pragmatis: Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada nilai-nilai etos kerja, integritas dan gotong royong, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- g. Enviromental development: KKN-RM dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan bersih, adanya sifat sosial dan saling gotong royong untuk kepentingan bersama.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan mahasiswa KKN-RM mampu mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa lain. Melalui GNRM diharapkan masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

2.2 Pembiayaan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan KKN-RM dilakukan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama menyediakan dana insentif bagi perguruan tinggi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bertemakan revolusi mental. Pengelolaan dana insentif tersebut dikerjasamakan dengan PT pelaksana KKN-RM dalam pola kerjasama swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kegiatan KKN secara keseluruhan dilaksanakan dengan pendanaan dari Perguruan Tinggi dengan dukungan dari Kementerian Ristekdikti, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain.
- c. Aksi nyata KKN-RM dilaksanakan untuk mendorong internalisasi nilai **Integritas** di mahasiswa, aparatur dan masyarakat, melalui program aksi Gerakan Indonesia Melayani.

3. TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari KKN-RM ini adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan publik dan perilaku aparat yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi sebagai bentuk internalisasi Nilai Integritas.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi stakeholders terkait dalam program Revolusi Mental.
- c. Melatih dan menanamkan nilai-nilai kepribadian dalam hal:
 1. Nasionalisme dan jiwa Pancasila
 2. Keuletan, etos kerja dan tanggungjawab
 3. Kemandirian dan kepemimpinan
 4. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong
 5. Meningkatkan daya saing nasional
 6. Mendorong learning community dan learning society
- d. Mengubah cara pandang, pola pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja yang lebih baik bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat
- e. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik

3.2. Tujuan Khusus

Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, KKN-RM memiliki tujuan khusus untuk mengimplementasikan Gerakan Indonesia Melayani (GIM).

3.3. Sasaran

Sasaran KKN-RM adalah masyarakat umum mulai pranata sosial yang kecil (RT, RW, Lingkungan, desa/kelurahan, dan seterusnya).

3.4. Manfaat

KKN-RM diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi sebagai berikut :

1. Mahasiswa

- a. Memperdalam pengertian dan implementasi mahasiswa terhadap Revolusi Mental melalui unsur-unsur strategis Revolusi Mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam perilaku hidup keseharian di masyarakat. Dalam KKN RM 2018 lebih berfokus pada nilai integritas.
- b. Memperdalam pengertian dan implementasi mahasiswa terhadap seluk beluk keseluruhan dari masalah pembangunan dalam hal gerakan Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Namun untuk KKN RM 2018 hanya berfokus pada Gerakan Melayani.
- c. Mendewasakan cara berfikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan aksi nyata Revolusi Mental melalui Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.
- d. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan integritas, etos kerja dan kegotongroyongan.
- e. Membina mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, dinamisator, dan problem solver
- f. Memberikan pengalaman belajar sebagai agen perubahan revolusi mental dalam sikap dan rasa cinta terhadap integritas, etos kerja, dan gotong royong.



- b. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan pelayanan, kebersihan, ketertiban, kemandirian, dan kebersamaan (bersatu).
- c. Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan daerah terkait dengan pelayanan, kebersihan, ketertiban, kemandirian, dan kebersamaan (bersatu) dalam sikap dan perilaku.







BAB II PENGELOLAAN KKN RM

1. PROSEDUR KKN-RM

- a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menunjuk Perguruan Tinggi Negeri dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama, menunjuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Diharapkan terdapat wakil PT dari setiap provinsi.
- b. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang terpilih menyusun proposal Kegiatan KKN-RM yang berisi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mencantumkan program Gerakan Indonesia Melayani dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh mahasiswa secara kelompok (8-15 orang) yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing lapangan.
- c. Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama, berwenang untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan dan penajaman proposal yang terpilih.
- d. Kemenko PMK bersama BPIP dan KPK akan mengadakan *Training of Trainer* bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terkait dengan substansi program KKN-RM dan pengelolaan administrasinya.
- e. Perguruan Tinggi (DPL) dan/atau Gugus Tugas Revolusi Mental di daerah memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN-RM terkait dengan pelaksanaan program maupun pengelolaan administrasi.
- f. Setelah mengikuti pembekalan, maka Perguruan Tinggi menempatkan mahasiswa ke lokasi KKN setelah berkoordinasi dengan pihak Kepala Desa dan atau pihak terkait lainnya.

- g. Monev terhadap pelaksanaan KKN-RM dapat dilakukan oleh Kementerian Ristekdikti, Kementerian Agama, Kemenko PMK, dan Gugus Tugas Revolusi Mental di daerah.
- h. Jika ada hal penting yang belum diketahui atau belum jelas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Kemahasiswaan, Kementerian Ristekdikti; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama; dan/atau Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Iptek, Kemenko PMK.

2. LEMBAGA PENGELOLA

Penyelenggaraan KKN-RM dikelola dan atau dikoordinasikan oleh Pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh Pimpinan dari masing-masing Perguruan Tinggi dan dibantu oleh Tim Kerja/Tim Pelaksana.

1. Pejabat pelaksana yang dibantu oleh Sekretaris memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan KKN-RM
 - b. Menyusun Laporan pelaksanaan KKN-RM sebagai bentuk pertanggungjawaban
2. Pejabat pelaksana membentuk Tim Kerja KKN-RM yang memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan operasional KKN-RM.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan KKN-RM.
 - c. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan KKN-RM.
 - d. Mengkoordinasikan tahapan operasional KKN-RM bersama mahasiswa, DPL dan Gugus Tugas Revolusi Mental di daerahnya.
 - e. Menyusun materi pembekalan untuk mahasiswa sesuai program gerakan perubahan Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Melayani) bersama dengan DPL.

- f. Bersama DPL merencanakan dan melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta KKN-RM.
- g. Menyusun form evaluasi pelaksanaan KKN-RM yang dilakukan oleh mahasiswa.
- h. Melakukan evaluasi kedisiplinan, etos kerja dan gotong royong mahasiswa pelaksanaan KKN-RM di lapangan dan mengkoordinasikan dengan hasil evaluasi Dosen Pembimbing maupun Gugus Tugas Revolusi Mental di daerah.

3. TATA LAKSANA PENGELOLAAN

- a. Tahap Persiapan
Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang kemahasiswaan dibantu oleh Sekretaris dan Tim Kerja KKN-RM bersama kelompok mahasiswa dari berbagai program studi yang disertai DPL menyusun usulan proposal kegiatan yang berisi KAK dan RAB. Proposal kegiatan tersebut kemudian dibahas bersama dengan Panitia dari Kemenko PMK, Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Agama. Bobot pekerjaan sampai tahap ini sudah meliputi 30% kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan
Mahasiswa diwajibkan melakukan semua kegiatan yang direncanakan bersama-sama kelompok masyarakat atau sasaran di lokasi KKN-RM serta membuat catatan harian, laporan bulanan dan laporan akhir. Mahasiswa harus membuat gambaran/potret pelayanan publik yang ada di lokasi KKN masing-masing, seperti di Kantor Desa/Kelurahan, Puskesmas/Puskesmasdes, Kantor Kepolisian, dan lain-lain sebagai gambaran awal sebelum ada KKN-RM. Mahasiswa juga harus membuat gambaran/potret pelayanan publik yang ada di lokasi KKN masing-masing setelah kegiatan berakhir, seperti di Kantor Desa/Kelurahan, Puskesmas/Puskesmasdes, Kantor Kepolisian, dan/atau instansi lain yang menjadi target kegiatan Gerakan Indonesia Melayani. Gambaran/potret tersebut harus dicantumkan dalam laoran akhir. Sampai dengan mahasiswa peserta KKN-RM tiba di lokasi kegiatan KKN masing-masing, maka bobot pekerjaan sampai tahap ini sudah mencapai 70% kegiatan.

c. Pelaksana

Pelaksana kegiatan KKN-RM adalah:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang kemahasiswaan atau sekretaris dibantu oleh Tim kerja KKN-RM
2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
3. Mahasiswa KKN-RM (yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor)

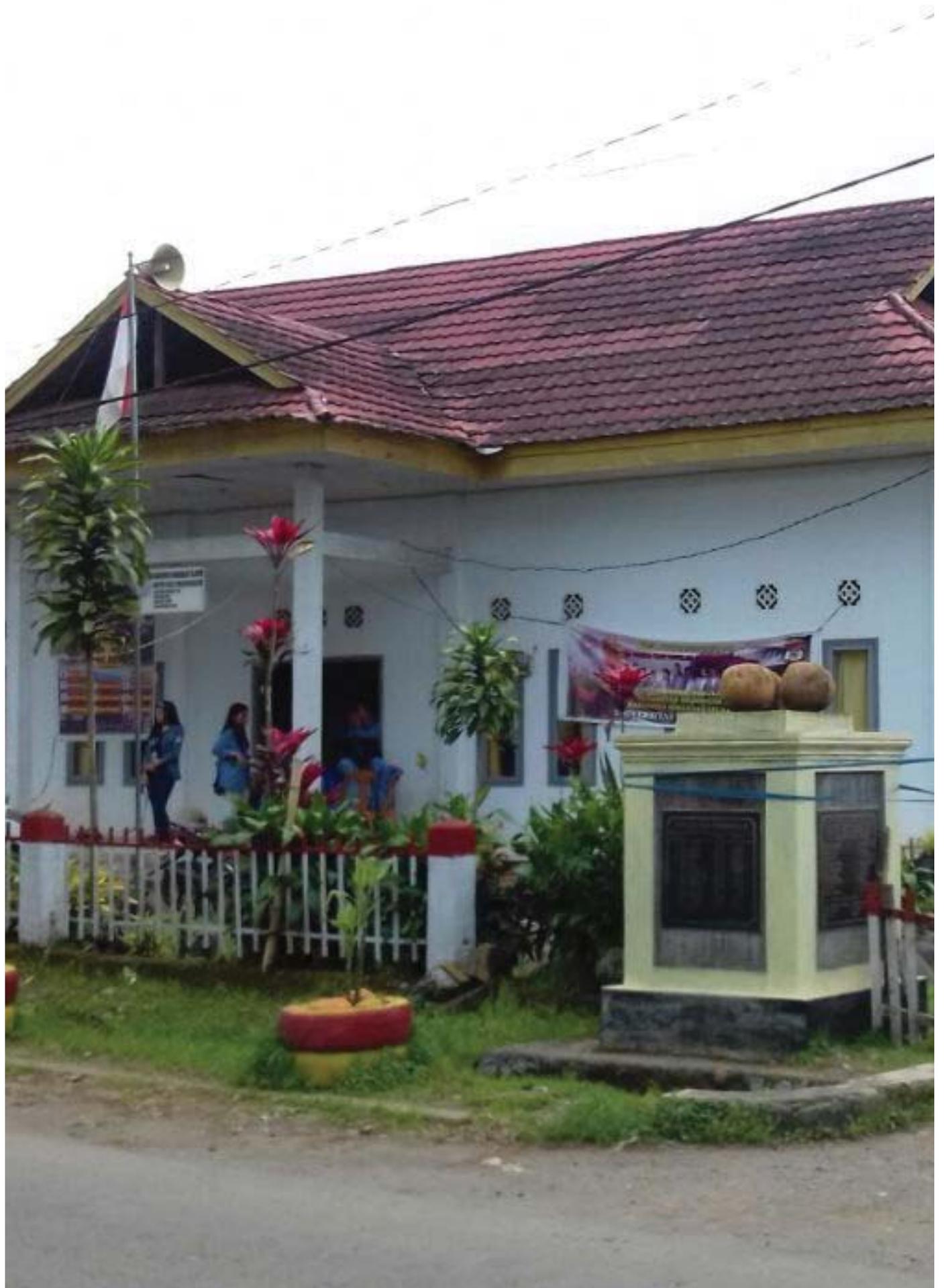
d. Tahap Pelaporan

Mahasiswa diwajibkan menyusun Laporan kegiatan di masing-masing lokasi KKN untuk dilaporkan kepada Tim Pelaksana KKN-RM di PT. Tim Pelaksana kemudian menyusun Laporan Akhir pelaksanaan pekerjaan KKN-RM untuk diserahkan kepada Kemenko PMK. Setelah Tim Pelaksana menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan KKN-RM beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan diserahkan kepada Kemenko PMK, maka bobot pekerjaan sampai tahap ini sudah mencapai 100% kegiatan.

4. PERSYARATAN

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti KKN-RM antara lain:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan S-1
- b. Mahasiswa yang telah terdaftar dalam rencana program KKN sesuai dengan penetapan dari perguruan tingginya
- c. Peserta KKN-RM dibagi kedalam kelompok untuk satu lokasi KKN. Masing-masing kelompok beranggotakan 8-15 orang mahasiswa yang berasal dari lintas program studi.





BAB III TAHAPAN KEGIATAN KKN RM

TAHAPAN KEGIATAN KKN RM

1. PERSIAPAN

Tahapan persiapan KKN-RM terdiri atas beberapa kegiatan yaitu pembekalan dan penempatan lokasi.

1. Rapat koordinasi dengan Rektor/Pembantu Rektor/Wakil Rektor/Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi terkait dengan program, anggaran, dan MoU KKN-RM.
2. Setiap Perguruan Tinggi menyusun proposal program KKN-RM dengan fokus tema Penanaman Nilai Integritas melalui Gerakan Indonesia Melayani yang berisi KAK dan RAB.
3. Proposal mengandung rencana kegiatan yang memuat
 - a. Konsep kegiatan KKN berdasarkan tema Gerakan Indonesia Melayani dan Gerakan Indonesia Tertib.
 - b. Volume, waktu dan biaya yang diperlukan.
 - c. Proposal agar mencantumkan bahwa dana insentif untuk mendukung muatan RM dikelola oleh masing-masing kelompok mahasiswa, yang jumlahnya 90% dari total biaya untuk kegiatan KKN-RM di masing-masing PT. Dana insentif per kelompok dapat dialokasikan sesuai keadaan di masing-masing lokasi KKN dengan peruntukan penggunaan seperti penyuluhan/lomba kreasi GNRM, fotokopi bahan sosialisasi, kampanye publik (spanduk/banner), advokasi/pendataan penduduk yang berhak mendapatkan bansos, demplot pertanian, demplot perikanan, demplot peternakan, bibit penghijauan, bahan atau alat kerjabakti, dan lain-lain. Bila terdapat rencana pembelian bahan/alat yang akan diserahkan ke masyarakat, maka wajib dicantumkan dalam proposal.
 - d. Alokasi penggunaan anggaran dari Kemenko PMK untuk biaya operasional PT sebesar 10% dari total biaya untuk kegiatan KKN-RM di masing-masing PT harus dicantumkan dalam proposal.
4. Pembekalan bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tentang nilai-nilai strategis Revolusi Mental dan 5 (lima) program gerakan perubahan serta mekanisme administrasi.

5. Kelompok peserta KKN-RM dibimbing oleh DPL untuk penajaman program di masing-masing lokasi KKN.
6. Pembekalan bagi mahasiswa peserta KKN-RM.
7. Penempatan mahasiswa KKN-RM di lokasi KKN-RM berdasarkan persetujuan dan/atau penetapan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan KKN-RM terdiri atas beberapa kegiatan yaitu pembuatan potret/gambaran awal pelayanan publik, sosialisasi program, penyusunan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pembuatan potret/gambaran akhir pelayanan publik dan pembuatan laporan.

a. Sosialisasi Program

Awal pelaksanaan KKN-RM adalah melakukan sosialisasi program yang telah direncanakan sebelumnya kepada masyarakat.

b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan

1. Mahasiswa menyusun kegiatan berdasarkan tema KKN- RM atas bimbingan DPL.
2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
3. Mahasiswa wajib membuat logbook harian dan dokumentasi kegiatan.

c. Pembuatan Laporan

Mahasiswa peserta KKN-RM dan Perguruan Tinggi wajib membuat Laporan pelaksanaan KKN-RM sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN-RM dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. Dalam laporan akhir wajib melampirkan foto-foto kegiatan dan film dokumenter KKN-RM berdurasi maksimum 10 menit dengan format video: mpeg atau mp4 atau avi.

Bagi peserta yang tidak mengirimkan laporan dalam bentuk tertulis, foto kegiatan maupun video serta tidak melengkapi bukti-bukti administrasi sesuai ketentuan akan mendapat sanksi pengembalian dana sebesar 15%. Laporan bisa disusun secara kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan KKN-RM selesai.

Peserta KKN-RM harus menyebarluaskan informasi aksi nyata Program GNRM yang dilakukan selama KKN melalui media sosial masing-masing (instagram, twitter, facebook, dan youtube) dengan memberi tanda pagar (hashtag) #KKNRM2018 dan mengaitkan (link) ke akun GNRM Kemenko PMK. Contoh posting di media sosial: Ayo berantas korupsi... #KKNRM2018. Penyebarluasan informasi menggunakan media sosial masing-masing peserta KKN akan turut membantu mensosialisasikan program pemerintah.





BAB IV EVALUASI PROGRAM KKN-RM

EVALUASI PROGRAM KKN-RM

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Melalui monitoring dan evaluasi, dapat diketahui berbagai hal menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak yang ditimbulkan. Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan program KKN-RM dilakukan terhadap program dan anggaran.

Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan KKN-RM guna pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Sementara evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian program, yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai, faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh lain yang ditimbulkan akibat pelaksanaan program KKN-RM. Evaluasi kegiatan KKN-RM dilaksanakan oleh Kementerian Ristekdikti, Kemenag, Kemenko PMK, dan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah. Kegiatan ini dilakukan pada akhir periode kegiatan KKN - RM dan pada setiap akhir tahun akademik.



Evaluasi meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penilaiannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap mahasiswa maupun terhadap masyarakat, yaitu perkembangan kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dan perkembangan kelembagaan (institutional development) yang terkait dengan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Bahan evaluasi dapat diperoleh dari laporan tertulis, foto kegiatan dan video dokumenter sebagai bentuk pertanggungjawaban dan manajerial atas semua kegiatan KKN-RM yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan itu, diketahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program KKN-RM, kelayakan program di masyarakat, dan besarnya partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk integritas, etos kerja dan gotong royong.







BAB IV EVALUASI PROGRAM KKN-RM

1. SUBSTANSI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM)

Aksi nyata GNRM mencakup 5 (lima) gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. Sesuai dengan fokus tema muatan kegiatan KKN-RM tahun 2018 pada penanaman nilai INTEGRITAS, maka substansi kegiatan KKN-RM hanya mencakup aksi nyata Gerakan Indonesia Melayani.

Gerakan Indonesia Melayani (GIM) adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

GIM merupakan gerakan yang berawal dari permasalahan masyarakat Indonesia dalam aspek pelayanan publik yang dinilai belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Karena itu, mutu pelayanan yang disediakan pemerintah perlu ditingkatkan agar lebih baik. Dengan adanya GIM diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik pada setiap instansi terutama yang mempunyai tugas utama menyediakan pelayanan umum. Gerakan ini dilakukan oleh para penyelenggara negara dan masyarakat yang saling bersinergi untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Institusi beserta aparaturnya yang menjadi sasaran Gerakan Indonesia Melayani diantaranya adalah Kantor Desa, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Kepolisian Sektor, Koramil, serta sekolah-sekolah. Bila dua atau lebih

kelompok KKN-RM memiliki institusi sasaran yang sama, maka kelompok-kelompok KKN-RM tersebut agar bermusyawarah untuk membagi institusi sasaran sehingga semua sasaran terjangkau dan kegiatan efektif.

Contoh Aksi Nyata dari GIM antara lain:

- a. Keterbukaan informasi publik yang jelas dan tegas terkait pelayanan umum, seperti informasi kepada masyarakat terkait prosedur dan biaya pengurusan administrasi pembuatan KTP, SIM, Akte Kelahiran, Pengurusan Nikah, Kematian, Izin Keramaian, Pengurusan IMB, dsb.
- b. Melakukan kampanye atau sosialisasi prosedur administrasi kependudukan.
- c. Membuat database kependudukan di kantor desa.
- d. Melakukan peningkatan cara layanan publik dengan berorientasi pada pelayanan yang cepat, tepat, dan murah.
- e. Pembuatan aplikasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- f. Prosedur pelayanan dengan standar biaya yang jelas dan bebas pungli dalam semua pengurusan perijinan, dsb.
- g. Memperbaiki sistematika pengaduan masyarakat.
- h. Sosialisasi pelayanan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
- i. Sosialisasi pembiasaan mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan minta tolong.
- j. Membudayakan pribadi berperilaku melayani.
- k. Membudayakan akuntabilitas publik dalam setiap penggunaan dana/anggaran publik/pemerintah dengan menampilkan neraca keuangan pada tempat yang dapat dilihat oleh publik. Contohnya adalah pertanggungjawaban anggaran di tempat-tempat ibadah.

2. PROSEDUR PROGRAM KKN-RM DI PERGURUAN TINGGI

Kegiatan KKN-RM dilaksanakan di wilayah sasaran yang telah dirancang dan disepakati antara Perguruan Tinggi dengan Kemenko PMK. Adapun prosedur pelaksanaan program KKN-RM:

1. Penetapan lokasi/Desa sasaran pelaksanaan KKN-RM dilakukan sebelum pembuatan Surat Pengajuan Kerjasama (SPK) antara Kemenko PMK dan Perguruan Tinggi. Diharapkan ada kelompok KKN-RM yang ditempatkan pada salah satu dari 1.000 (seribu) Desa yang menjadi prioritas pembangunan yang tersebar di 100 (seratus) Kabupaten/Kota Prioritas.
2. Mahasiswa wajib mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan KKN-RM yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

Setelah mengikuti acara pembekalan, peserta KKN-RM wajib melakukan konsultasi bersama DPL untuk merancang program yang akan dilaksanakan di lokasi KKN-RM. Mahasiswa bersama DPL menunjuk koordinator desa/ kelurahan (kordes/korkel) dan petugas lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan KKN-RM. Mahasiswa bersama DPL merancang pembagian tugas untuk setiap individu dan tugas kelompok. Mahasiswa mempersiapkan perbekalan, perlengkapan, fasilitas, dan sarana lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan KKN-RM. Sambil menunggu tanggal pemberangkatan ke lokasi, mahasiswa dalam satu lokasi KKN-RM selalu melakukan koordinasi untuk mematangkan program dan melengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan. Jika mahasiswa mengalami masalah dalam persiapan dapat berkonsultasi kepada DPL.

3. PELAKSANAAN KKN-RM

- a. Mahasiswa siap dan berada di lokasi pemberangkatan tepat waktu dengan berbagai perlengkapan yang diperlukannya.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti upacara pemberangkatan.
- c. Tiba di lokasi KKN-RM, mahasiswa secara tertib dan santun wajib mengikuti acara penerimaan oleh pihak yang ditempati KKN-RM.

- d. Mahasiswa menuju ke tempat pemondokan dengan tetap menjaga etika kemahasiswaan dan akademik.
- e. Mahasiswa melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak terkait, pimpinan dan staf personalia tempat KKN-RM seperti pihak kecamatan, dinas/ instansi, kepala desa, perangkat desa, fungsionaris lembaga desa (BPD dan LPMD), kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya.
- f. Mahasiswa melakukan orientasi kepada masyarakat dan wilayah lokasi KKN-RM untuk melihat visibilitas program yang telah dirancang dan menemukan hal baru yang berpotensi untuk dikembangkan.
- g. Menyempurnakan rancangan program dan mempresentasikannya kepada pihak-pihak terkait serta mengesahkan rancangan program hasil kesepakatan bersama DPL dan pihak sasaran KKN-RM.
- h. Menyusun jadwal pelaksanaan program hasil kesepakatan.
- i. Menggandakan rancangan program hasil kesepakatan dan jadwal pelaksanaan program dan mensosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- j. Melaksanakan program yang telah dirancang secara terkoordinasi, sistematis, dan bertanggung jawab.
- k. Mahasiswa wajib mengunggah foto dan informasi kegiatannya pada akun medsos pribadi maupun ditautkan ke laman GNRM Kemenko PMK.

4. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Menyusun Laporan Hasil KKN-RM
- b. Menyusun laporan berkala secara individu dan mengonsultasikannya kepada DPL. Meminta tanda tangan DPL dan Kepala Desa tempat KKN-RM sebagai bukti keabsahan laporan. Laporan disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi/Pengelola KKN.
- c. Membuat laporan akhir.

- d. Mengkonsultasikan laporan akhir kepada DPL dan meminta pengesahannya dari DPL dan pihak pimpinan tempat KKN- RM.
- e. Mengirimkan 1 (satu) salinan Laporan Akhir kepada Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

5. KOORDINASI PEMBIMBINGAN DAN KOMUNIKASI

- a. Menjalin komunikasi dengan perangkat desa, pimpinan lembaga/ instansi, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Mengkomunikasikan permasalahan kelompok kepada dosen pembimbing lapangan (DPL).
- b. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelompok.
- c. Mengoordinasikan laporan kemajuan anggota kelompok.
- d. Mengoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan KKN-RM.
- e. Mengoordinasikan kegiatan perpisahan dengan aparat dan masyarakat di desa.
- f. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi anggota kelompok dalam melaksanakan KKN-RM dan menjaga kekompakan, keutuhan, dan kebersamaan anggota KKN-RM.
- g. Mengikuti rapat koordinasi tingkat desa/masyarakat sasaran, kecamatan, atau rapat-rapat lainnya yang memerlukan perwakilan.
- h. Dalam pembimbingan, DPL memiliki tugas, tanggungjawab, dan kewenangan sebagai berikut:
 - 1. Tahap Pra-Pembekalan
 - a. Melakukan kunjungan ke wilayah KKN-RM yang akan ditempati oleh mahasiswa bimbingannya.
 - b. Menginventarisasi permasalahan dan memetakan potensi tempat KKN-RM yang akan diprogramkan.
 - c. Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada mahasiswa saat kegiatan pembekalan.

2. Tahap Pembekalan

- a. Memberikan informasi potensi tempat KKN-RM kepada mahasiswa
- b. Mendampingi mahasiswa mempersiapkan rancangan program awal untuk pelaksanaan KKN-RM
- c. Mengarahkan dan menyarankan mahasiswa bimbingannya tentang perlengkapan yang perlu dipersiapkan sebelum menuju tempat KKN-RM
- d. Menyepakati jadwal dan tata tertib dalam pembimbingan atau pendampingan dalam pelaksanaan KKN-RM
- e. Membimbing mahasiswa melakukan kunjungan untuk melengkapi informasi dari DPL dan penetapan POSKO KKN-RM.

3. Tahap Pelaksanaan di Lapangan

- a. Mendampingi mahasiswa dalam keberangkatannya menuju lokasi KKN-RM
- b. Memperkenalkan mahasiswa kepada pejabat dan tokoh masyarakat di lokasi KKN-RM.
- c. Mendampingi dan memberikan masukan kepada mahasiswa, pejabat desa/lembaga tempat KKN-RM, dan masyarakat dalam penyusunan program KKN- RM.
- d. Memantau pelaksanaan program KKN-RM yang telah disusun dan disepakati bersama antara pihak mahasiswa dan pihak terkait.
- e. Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam pelaksanaan program yang telah dirancang.
- f. Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN-RM.

- g. Menolak atau membatalkan program-program baru yang disusun oleh mahasiswa jika dipandang tidak bermanfaat secara akademik maupun kebutuhan sasaran.
- h. Mendampingi mahasiswa dalam mengoordinasi hasil-hasil KKN-RM bersama Kordes/Korkel, Kepala Desa, dan pihak terkait lainnya untuk kepentingan penyusunan laporan.
- i. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir.
- j. Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan focused group discussion (FGD) pengembangan program KKN- RM.
- k. Menerima dan melakukan koreksilaporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan KKN-RM.

4. Tahap Evaluasi

- a. Mengevaluasi prestasi yang telah dicapai mahasiswa dalam mengikuti pembekalan, penyusunan proposal/ program, pelaksanaan di lapangan, FGD, dan pelaporan serta rencana tindak lanjut.
- b. Menerima, mengolah laporan dan penilaian KKN-RM mahasiswa dari antar mahasiswa sendiri maupun dari penanggung jawab lapangan tempat KKN-RM.

6. TATA TERTIB MAHASISWA DALAM KKN-RM

- a. Peserta KKN-RM wajib mengikuti pembekalan secara seksama, dan bilamana tidak mengikutinya maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri
- b. Peserta KKN-RM wajib membawa jas almamater dan identitas diri lainnya sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan memakainya pada acara-acara formal.
- c. Peserta KKN-RM wajib menjaga tatakrama hidup bermasyarakat dan menjaga nama baik almamater.

- d. Peserta KKN-RM wajib selalu berpakaian rapi dengan tetap menjaga kesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat lokasi KKN-RM.
- e. Peserta KKN-RM wajib menjalankan dan memenuhi program yang telah direncanakan dan disepakati bersama secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
- f. Peserta KKN-RM harus menjaga hubungan baik sesama peserta KKN-RM dan tetap menjaga kekompakan dalam belajar dan berkarya nyata di masyarakat.
- g. Setiap peserta KKN-RM harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKN- RM.
- h. Peserta KKN-RM harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedang belajar dan membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik yang terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
- i. Peserta KKN-RM harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan programnya sehingga dapat memberikan contoh dan memotivasi masyarakat sekitar untuk mendukung program yang telah dirancang.
- j. Peserta KKN-RM wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, dan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat dan menahan diri untuk tidak menimbulkan masalah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan dirinya.
- k. Larangan bagi Peserta KKN-RM, yaitu:
 - 1. Peserta KKN-RM tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak santun yang dapat menimbulkan pergunjingan di masyarakat.
 - 2. Peserta KKN-RM dilarang membawa dan melakukan minum-minuman keras dan obat-obat terlarang.

3. Peserta KKN-RM dilarang melakukan perbuatan-perbuatan negatif dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim.
 4. Setiap peserta KKN-RM dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan dalam perihal perjudian.
 5. Peserta KKN-RM tidak boleh meninggalkan lokasi KKN- RM, kecuali melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan realisasi program-program KKN-RM dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapat ijin dari penanggung jawab tempat KKN-RM.
 6. Peserta KKN-RM dilarang membuat stempel KKN-RM.
 7. Peserta KKN-RM tidak boleh menerima tamu di luar kegiatan KKN-RM lebih dari pukul 21.00 WIB.
 8. Peserta KKN-RM harus menandatangani daftar hadir yang disiapkan di lokasi KKN-RM. Ketika meninggalkan lokasi KKN-RM, mahasiswa harus mengisi berita acara kegiatan yang akan dilakukan (kegiatan tersebut terkait dengan program KKN-RM atau kegiatan lain yang diizinkan berdasarkan aturan KKN-RM).
- l. Aturan umum pemondokan mahasiswa pria dan mahasiswa wanita terpisah (tidak dalam satu rumah pemondokan).
- m. Administrasi Pelaksanaan KKN-RM, yaitu:
1. Petunjuk Surat-menyurat
Dalam melaksanakan KKN-RM, mahasiswa pada umumnya melakukan kegiatan surat menyurat, baik untuk minta bantuan tenaga/ bahan dari pihak lain. Dalam surat menyurat hendaknya menggunakan bahasa yang lugas dan jelas; menulis nama/ jabatan, dan alamat lengkap tujuan; diketahui/ditandatangani oleh: (1) Kordes/Korkel, (2) Kades/ Lurah, (3) DPL.

2. Petunjuk Pengajuan Piagam/Sertifikat (bila diperlukan).

Sebelum kegiatan dilakukan, mahasiswa membuat piagam/sertifikat dan mengetik nama-nama orang yang akan diberi piagam/sertifikat dan mencetaknya. Mahasiswa memintakan tanda tangan piagam/sertifikat tersebut yang disertai dengan daftar hadir peserta yang akan diberi piagam/sertifikat.

3. Buku Kegiatan Harian

Peserta KKN-RM harus membuat buku harian yang telah disepakati oleh Perguruan Tinggi.

Hari/tanggal yang diisi hanya hari/tanggal yang berhubungan dengan kegiatan KKN-RM, sedangkan hari/ tanggal yang tidak ada kegiatan KKN-RM tidak perlu diisi, misalnya: izin pulang kampung.

4. Petunjuk Penyusunan Laporan

Laporan pelaksanaan dimaksud sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN-RM dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. Dalam laporan akhir wajib melampirkan foto-foto kegiatan dan film dokumenter KKN-RM berdurasi maksimum 15 menit dengan format video: mpeg atau mp4 atau avi.

Bagi peserta yang tidak mengirimkan laporan dalam bentuk tertulis, foto kegiatan maupun video, tidak menampilkan kegiatannya di akun medsos pribadi atau di tautan laman GNRM, serta tidak melengkapi bukti-bukti administrasi sesuai ketentuan akan mendapat sanksi pengembalian dana sebesar 15%. Laporan bisa disusun secara kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan KKN-RM selesai.





LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB Total 200 Juta (100%) – Kegiatan KKN-RM mencakup “minimal” 3 (tiga) dari 5 (lima) Program Gerakan yang sudah dijelaskan pada Subbab Substansi GNRM.

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
A	Operasional Manajemen KKN			20.000.000
1	Belanja Bahan			
	• Pengadaan Bahan dan dok			
	• Konsumsi Rapat (Makan dan Snack)			
	• Laporan Video dan Foto			
	• Laporan Pedahuluan dan Akhir			
2	Belanja Jasa Profesi			
	• Honor Narasumber		1.000.000	
	• Honor Moderator		700.000	
3	Honor Output kegiatan			
	• Honor Tim Pelaksana (20 org x 1 Keg) (SK Tim)		300.000	
B	Pembiayaan Pelaksanaan Program KKN			180.000.000
	Program mewujudkan pelayanan publik (Melayani)			
	TOTAL			200.000.000

a. RAB Termin ke-1 - 70% 140 Juta

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
A	Operasional Manajemen KKN			14.000.000
1	Belanja Bahan			
	• Pengadaan Bahan dan dok			
	• Konsumsi Rapat (Makan dan Snack)			
	• Laporan Video dan Foto			
	• Laporan Pedahuluan dan Akhir			
2	Belanja Jasa Profesi			
	• Honor Narasumber		1.000.000	
	• Honor Moderator		700.000	
3	Honor Output kegiatan			
	• Honor Tim Pelaksana (20 org x 1 Keg) (SK Tim)		300.000	
B	Pembiayaan Pelaksanaan Program KKN			126.000.000
	Program mewujudkan pelayanan publik (Melayani)			
	Program mewujudkan kebersihan lingkungan (Bersih)			
	Program mewujudkan lingkungan tertib (Tertib)			
	Program mewujudkan kemandirian ekonomi kreatif (Mandiri)			
	Program mewujudkan persatuan dan kebangsaan (Bersatu)			
	TOTAL			140.000.000

b. Rab Termin Ke-2 - 30% (60 Juta)

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
A	Operasional Manajemen KKN			6.000.000
1	Belanja Bahan			
	• Pengadaan Bahan dan dok			
	• Konsumsi Rapat (Makan dan Snack)			
	• Laporan Video dan Foto			
	• Laporan Pedahuluan dan Akhir			
2	Belanja Jasa Profesi			
	• Honor Narasumber		1.000.000	
	• Honor Moderator		700.000	
3	Honor Output kegiatan			

	• Honor Tim Pelaksana (20 org x 1 Keg) (SK Tim)		300.000	
B	Pembiayaan Pelaksanaan Program KKN			54.000.000
	Program mewujudkan pelayanan publik (Melayani)			
	Program mewujudkan kebersihan lingkungan (Bersih)			
	Program mewujudkan lingkungan tertib (Tertib)			
	Program mewujudkan kemandirian ekonomi kreatif (Mandiri)			
	Program mewujudkan persatuan dan kebangsaan (Bersatu)			
	TOTAL			60.000.000

Lampiran 2. Pedoman Bentuk Pertanggungjawaban Dana

No	Uraian Pengeluaran	Bentuk SPJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembayaran Honorarium (Narasumber / Moderator)	Daftar Nominatif	<ol style="list-style-type: none"> Contoh daftar nominatif terlampir. Dokumen pendukung: <ol style="list-style-type: none"> Absen kehadiran; Undangan; Surat tugas dari atasan langsung peg ybs (jika PNS) Narsum melampirkan CV atau keterangan lainnya yg menyatakan ybs ahli dibidangnya/layak sbg narasumber dan bahan paparannya. Potong pajak PPh. Ps.21 (Final) dengan tarif: <ol style="list-style-type: none"> Jika PNS: Gol I/II = 0%, Gol.III=5% dan Gol.IV=15% Non PNS: 5% jika memiliki NPWP atau 6% jika tidak memiliki NPWP
2.	Pembayaran uang saku peserta rapat/ sosialisasi/seminar/sejenis nya	Daftar Nominatif	<ol style="list-style-type: none"> Contoh daftar nominatif terlampir. Dokumen pendukung: <ol style="list-style-type: none"> Absen kehadiran; Undangan; Surat tugas dari atasan langsung peg ybs (jika PNS) Potong pajak PPh. Ps.21 (Final) dengan tarif: <ol style="list-style-type: none"> Jika PNS: Gol I/II = 0%, Gol.III=5% dan Gol.IV=15% Non PNS: 5% jika memiliki NPWP atau 6% jika tidak memiliki NPWP
3.	Pembayaran penggantian transport	Daftar Nominatif	<ol style="list-style-type: none"> Contoh daftar nominatif terlampir. Dokumen pendukung:

No	Uraian Pengeluaran	Bentuk SPJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ol style="list-style-type: none"> a. Absen kehadiran; b. Undangan; c. Surat tugas dari atasan langsung peg ybs (jika PNS) <p>3. Tanpa Potong pajak</p>
4.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Daftar Nomina tif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh daftar nominatif terlampir. 2. Dokumen pendukung: SK pembentukan kepanitiaan 3. Potong pajak PPh. Ps.21 (Final) dengan tarif: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika PNS: Gol I/II = 0%, Gol.III=5% dan Gol.IV=15% b. Non PNS: 5% jika memiliki NPWP atau 6% jika tidak memiliki NPWP 4. Jumlah panitia maksimal 10% dari jumlah peserta rapat/kegiatan
5.	Perjalanan Dinas (Perdin)	Kuitansi dan Visum SPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh kuitansi Perdin dan format SPD terlampir. 2. Dokumen pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiket pesawat (boarding pas), tiket KA, karcis bis dan bukti2 pengeluaran transport lainnya yg dpt diperoleh b. Bukti penginapan (tagihan hotel/penginapan dsb). c. Jika bukti-bukti sebagaimana tersebut pada huruf a dan b tidak dpt diperoleh, pelaksana perdin membuat/menandatangani Daftar Pengeluaran Riil (contoh terlampir). 3. Surat tugas dari atasan langsung peg ybs (jika PNS).
6.	Pembelian konsumsi/snack/Alat Tulis	Kuitansi/nota pembelian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format kuitansi sesuai format kuitansi yang dijual scr umum atau berupa kuitansi/nota yang bentuk/formatnya tersendiri yang dibuat oleh toko/penyedia.

No	Uraian Pengeluaran	Bentuk SPJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kantor/ Bahan-bahan rapat/penggunaan dsb (termasuk jika ada pembelian bahan untuk dijadikan souvenir/door prize utk peserta sosialisasi/seminar)		<p>2. Uraian penerima pada kuitansi "Sudah terima dari" diisi: <i>Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi IV</i></p> <p>3. Ketentuan pengenaan bea materai:</p> <p>a. Kuitansi berjumlah diatas Rp.250.000 s/d Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000</p> <p>b. Kuitansi berjumlah diatas Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.6.000</p> <p>4. Ketentuan Pemotongan pajak :</p> <p>a. PPh Ps.22 (atas Pengadaan barang): Dikenakan untuk jumlah pembayaran <u>mulai diatas Rp.2.000.000,-</u> (dua juta rupiah) dengan tarif 1,5%;</p> <p>b. Contoh perhitungan sbb = Harga Netto (sebelum ditambah PPN) X 1,5% Harga netto : Rp. 10.000.000,- PPN : <u>Rp. 1.000.000,-</u> Harga bruto : Rp. 11.000.000,- PPh pasal 22 = Rp. 10.000.000,- X 1,5% = Rp. 150.000,-</p> <p>c. Tarif PPN</p> <p>1. Dikenakan untuk jumlah pembayaran <u>mulai diatas Rp. 1.000.000,-</u> (satu juta rupiah);</p> <p>2. Tarif PPN adalah 10% atas Dasar Pengenaan Pajak (dari jumlah netto) atau 10/110 dari jumlah bruto;</p> <p>Contoh Perhitungan PPN:</p> <p>Harga netto : Rp. 10.000.000,- PPN(10%): <u>Rp. 1.000.000,-</u> Harga bruto : Rp. 11.000.000,-</p> <p>Atau jika kuitansinya sdh termasuk PPN namun tidak dirinci besar PPNnya (contoh diatas pada kuitansi langsung tertulis Rp.11.000.000,- maka</p>

No	Uraian Pengeluaran	Bentuk SPJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>potongan PPNnya adalah 10/110 x Rp.11.000.000,-</p> <p>d. Wajib dibuat daftar rekapitulasi pemotongan pajak sesuai dengan format terlampir (lihat Lampiran 12).</p>
7.	Penyewaan kendaraan/infocus/laptop/sewa ruangan utk rapat dsb	Kuitansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format kuitansi sesuai format kuitansi yang dijual scr umum atau berupa kuitansi/nota yang bentuk/formatnya tersendiri yang dibuat oleh penyedia. 2. Uraian penerima pada kuitansi "Sudah terima dari" diisi: <i>Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi IV</i> 3. Ketentuan pengenaan bea materai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kuitansi berjumlah diatas Rp.250.000 s/d Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000 b. Kuitansi berjumlah diatas Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.6.000 4. Ketentuan Pemotongan pajak : <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif PPh pasal 23 (dikenakan atas pekerjaan jasa, termasuk pembelian konsumsi secara <u>Catering/Prasmanan</u>): Dikenakan untuk seluruh jumlah pembayaran (tidak ada batas minimal); dengan tarif PPh. PS.23 = 2%; b. Contoh perhitungan sbb = Harga Netto (sebelum ditambah PPN) X 2% <p>Harga netto : Rp. 10.000.000,- PPN : <u>Rp. 1.000.000,-</u> Harga bruto : Rp. 11.000.000,- PPh pasal 23 = Rp. 10.000.000,- X 2%= Rp. 200.000,-</p> c. Tarif PPN <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenakan untuk jumlah pembayaran <u>mulai diatas Rp. 1.000.000,-</u> (satu juta rupiah);

No	Uraian Pengeluaran	Bentuk SPJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>potongan PPNnya adalah 10/110 x Rp.11.000.000,- d. Wajib dibuat daftar rekapitulasi pemotongan pajak sesuai dengan format terlampir (lihat Lampiran 12).</p>
7.	Penyewaan kendaraan/infocus/ laptop/sewa ruangan utk rapat dsb	Kuitansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format kuitansi sesuai format kuitansi yang dijual scr umum atau berupa kuitansi/nota yang bentuk/formatnya tersendiri yang dibuat oleh penyedia. 2. Uraian penerima pada kuitansi "Sudah terima dari" diisi: <i>Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi IV</i> 3. Ketentuan pengenaan bea materai: <ol style="list-style-type: none"> a. Kuitansi berjumlah diatas Rp.250.000 s/d Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.3.000 b. Kuitansi berjumlah diatas Rp.1.000.000,- bermaterai Rp.6.000 4. Ketentuan Pemotongan pajak : <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif PPh pasal 23 (dikenakan atas pekerjaan jasa, termasuk pembelian konsumsi secara <u>Catering/Prasmanan</u>): Dikenakan untuk seluruh jumlah pembayaran (tidak ada batas minimal); dengan tarif PPh. PS.23 = 2%; b. Contoh perhitungan sbb = Harga Netto (sebelum ditambah PPN) X 2% Harga netto : Rp. 10.000.000,- PPN : <u>Rp. 1.000.000,-</u> Harga bruto : Rp. 11.000.000,- PPh pasal 23 = Rp. 10.000.000,- X 2%= Rp. 200.000,- c. Tarif PPN <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenakan untuk jumlah pembayaran <u>mulai diatas Rp. 1.000.000,-</u> (satu juta rupiah);

No	Uraian Pengeluaran	Bentuk SPJ	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>2. Tarif PPN adalah 10% atas Dasar Pengenaan Pajak (dari jumlah netto) atau 10/110 dari jumlah bruto; Contoh Perhitungan PPN: Harga netto : Rp. 10.000.000,- PPN(10%): <u>Rp. 1.000.000,-</u> Harga bruto : Rp. 11.000.000,- Atau jika kuitansinya sdh termasuk PPN namun tidak dirinci besar PPNnya (contoh diatas pada kuitansi langsung tertulis Rp.11.000.000,- maka potongan PPNnya adalah 10/110 x Rp.11.000.000,-</p> <p>3. Wajib dibuat daftar rekapitulasi pemotongan pajak sesuai dengan format terlampir (lihat lampiran 12).</p>

D. Daftar PPN yang Dipungut

Daftar PPN yang Dipungut

Masa: Tahun:

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Faktur Pajak		Kode dan No. Seri FP yang Diganti	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal setor PPN
			Kode dan No. Seri	Tanggal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Jumlah PPN								

Jakarta,
 Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Lingkup Deputi IV

Lampiran 5. Contoh Bukti Pertanggungjawaban Anggaran

A. Form Daftar Hadir

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

DAFTAR HADIR PESERTA

Agenda :

Hari/Tanggal :

Provinsi :

No	Nama	Jabatan/Instansi	No. Telp	Alamat E-mail	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Yang Membuat Daftar,

(.....)

B. Contoh Form Kuitansi

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi IV	
Jumlah Uang	: Rp.....
Terbilang	:
Untuk Pembayaran	:
.....,	
Yang Menerima	
(.....)	
Setuju Bayar Pejabat Pembuat Komitmen Pengeluaran Pembantu Lingkup Deputi IV	Lunas Bayar Bendahara Lingkup Deputi IV
Jazziray Hartoyo NIP. 19710207 199803 1003	Dwi Haryono NIP. 19830616 200604 1001
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik	
Pejabat yang Bertanggungjawab <i>Ditandatangani oleh Rektor Universitas</i>	
(.....)	

C. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber Eselon I

DAFTAR PENERIMAAN HONOR NARASUMBER ESELON I

Agenda :
 Hari/Tanggal :
 Provinsi :

No	Nama	Honorarium	PPh 15%	Diterima	Tanda Tangan
1		1 JPL x Rp1.400.000 = Rp1.400.000	Rp210.000	Rp1.190.000	1
J U M L A H		Rp1.400.000	Rp210.000	Rp1.190.000	

Terbilang "Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah"

Yang Membuat Daftar,

(.....)

DAFTAR HADIR NARASUMBER ESELON I

Agenda :
Hari/Tanggal :
Provinsi :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1			



BIODATA NARASUMBER

Nama :
.....
Tempat/tanggal lahir :
.....
Jabatan :
.....
Nama Instansi :
.....
Pendidikan :
.....
Alamat :
.....
No telp :
.....
Email :
.....

....., 2018

(.....)

D. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber Eselon II

DAFTAR PENERIMAAN HONOR NARASUMBER ESELON II

Agenda :
 Hari/Tanggal :
 Provinsi :

No	Nama	Honorarium	PPh 15%	Diterima	Tanda Tangan
1		1 JPL x Rp1.000.000 = Rp1.000.000	Rp150.000	Rp850.000 1	
J U M L A H		Rp1.000.000	Rp150.000	Rp850.000	

Terbilang "Satu Juta Rupiah"

Yang Membuat Daftar,

(.....)

DAFTAR HADIR NARASUMBER ESELON II

Agenda :
Hari/Tanggal :
Provinsi :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1			



BIODATA NARASUMBER

Nama :
.....
Tempat/tanggal lahir :
.....
Jabatan :
.....
Nama Instansi :
.....
Pendidikan :
.....
Alamat :
.....
No telp :
.....
Email :
.....

....., 2018

(.....)

E. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir, dan Biodata Narasumber Eselon III

DAFTAR PENERIMAAN HONOR NARASUMBER ESELON III

Agenda :
 Hari/Tanggal :
 Provinsi :

No	Nama	Honorarium	PPH 15%	Diterima	Tanda Tangan
1		1 JPL x Rp900.000 = Rp900.000	Rp135.000	Rp765.000	1
J U M L A H		Rp900.000	Rp135.000	Rp765.000	

Terbilang "Sembilan Ratus Ribu Rupiah"

Yang Membuat Daftar,

(.....)

DAFTAR HADIR NARASUMBER ESELON III

Agenda :
Hari/Tanggal :
Provinsi :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1			



BIODATA NARASUMBER

Nama :
.....
Tempat/tanggal lahir :
.....
Jabatan :
.....
Nama Instansi :
.....
Pendidikan :
.....
Alamat :
.....
No telp :
.....
Email :
.....

....., 2018

(.....)

F. Form Daftar Honorarium, Daftar Hadir Moderator

DAFTAR PENERIMAAN HONOR MODERATOR

Agenda :
 Hari/Tanggal :
 Provinsi :

No	Nama	Honorarium	PPH 15%	Diterima	Tanda Tangan
1		1 JPL x Rp700.000 = Rp700.000	Rp105.000	Rp595.000	1
J U M L A H		Rp700.000	Rp105.000	Rp595.000	

Terbilang "Tujuh Ratus Ribu Rupiah"

Yang Membuat Daftar,

(.....)

DAFTAR HADIR MODERATOR

Agenda :
Hari/Tanggal :
Provinsi :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1			

G. Form Daftar Penerimaan Uang Transport

DAFTAR PENERIMAAN UANG TRANSPORT

Agenda :

Hari/Tanggal :

Provinsi :

No	Nama	Besarnya	Diterima	Tanda Tangan
1		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	1
2		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	2
3		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	3
4		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	4
5		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	5
6		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	6
7		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	7
8		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	8
9		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	9
10		1 Hr x Rp150.000	Rp150.000	10
J U M L A H			Rp1.500.000	

Yang Membuat Daftar

(.....)

H. Form Daftar Penerimaan Honorarium dan Daftar Hadir Tim Perencana

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PERENCANA KEGIATAN SWAKELOLA
GERAKAN INDONESIA DI PROVINSI**
Tanggal

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK	HONORARIUM	PPh 6%	DITERIMA	TANDA TANGAN
1		Ketua	1 OK x Rp400.000 = Rp400.000	Rp24.000	Rp376.000	
2		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
3		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
J U M L A H				Rp60.000	Rp940.000	

Yang Membuat Daftar,

(.....)

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR HADIR TIM PERENCANA KEGIATAN SWAKELOLA
GERAKAN INDONESIA DI PROVINSI

Tanggal

No	Nama	Jabatan/Instansi	No. Telp	Alamat E-mail	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Yang Membuat Daftar,

(.....)

I. Form Daftar Penerimaan Honorarium dan Daftar Hadir
Tim Pengawas

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA
GERAKAN INDONESIA DI PROVINSI

Tanggal

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK	HONORARIUM	Pph 5%	DITERIMA	TANDA TANGAN
1		Ketua	1 OK x Rp400.000 = Rp400.000	Rp24.000	Rp376.000	
2		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
3		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
J U M L A H			Rp1.000.000	Rp60.000	Rp940.000	

Yang Membuat Daftar,

(.....)

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR HADIR TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA
GERAKAN INDONESIA DI PROVINSI
Tanggal

No	Nama	Jabatan/Instansi	No. Telp	Alamat E-mail	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Yang Membuat Daftar,

(.....)

J. Form Daftar Penerimaan Honorarium dan Daftar Hadir Tim Pelaksana

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PELAKSAA KEGIATAN SWAKELOLA
GERAKAN INDONESIA DI PROVINSI

Tanggal

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK	HONORARIUM	Pph 6%	DITERIMA	TANDA TANGAN
1		Penanggung Jawab	1 OK x Rp450.000 = Rp450.000	Rp27.000	Rp423.000	
2		Ketua	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
3		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
4		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
5		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
6		Anggota	1 OK x Rp300.000 = Rp300.000	Rp18.000	Rp282.000	
J U M L A H			Rp1.950.000	Rp117.000	Rp1.833.000	

Yang Membuat Daftar,

(.....)

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA
GERAKAN INDONESIA DI PROVINSI

Tanggal

No	Nama	Jabatan/Instansi	No. Telp	Alamat	E-mail	Tanda Tangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Yang Membuat Daftar,

(.....)

CATATAN
.....

CATATAN
.....